

## BASIS TEORITIS PENGEMBANGAN PARADIGMA HUKUM ISLAM\*

Oleh: Abid Rohmanu

Basis teoritis dalam tulisan ini mengerucut pada dua hal, *pertama*, tentang pentingnya pengembangan paradigma dalam kaca mata filsafat ilmu, *kedua* tentang paradigma dan pergeseran paradigma sebagaimana berkembang dalam ilmu sosial. Kedua hal ini menurut penulis relevan dengan tema bab ini, yakni pengembangan keilmuan, termasuk hukum Islam. Pengembangan ilmu hukum Islam mutlak membutuhkan pergeseran paradigmatis dari teosentris ke teoantroposentris. Pada bagian akhir bab akan disampaikan eksemplar teologis paradigma teoantroposentris.

Pengembangan paradigma hukum tidak bisa lepas dari filsafat sebagai induk ilmu. Dalam sejarahnya, hubungan antara filsafat dan ilmu mengalami pasang surut. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan pengklasifikasian ilmunya, ilmu pengetahuan memisahkan diri dari filsafat. Yang terjadi kemudian adalah sekat-sekat antar ilmu pengetahuan, bahkan terjadi arogansi keilmuan<sup>1</sup> dengan tidak saling menyapa antara satu ilmu dengan ilmu yang lain.

Pengembangan suatu ilmu meniscayakan kehadiran filsafat yang berkarakter kritis, radikal, dan spekulatif. Tetapi pada kenyataannya disiplin filsafat lebih banyak dicurigai dan dihindari dalam pengkajian ilmu. Jujun S. Suriasumantri menegaskan bahwa filsafat adalah payung yang manaungi pemahaman ilmu dengan segala aspeknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan “moral keilmuan” seiring dengan peningkatan penalaran ilmiah.<sup>2</sup> Moral keilmuan inilah yang akan mendatangkan kearifan bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu pengetahuan keagamaan sekalipun) mempunyai keterbatasan. Ilmu pengetahuan keagamaan dalam hal ini harus dibedakan dengan agama yang bersifat sempurna, sakral dan diyakini kebenarannya secara absolut.

Selain itu, kehadiran filsafat juga sangat diperlukan dalam mendialogkan antar disiplin ilmu. Filsafat ilmu dalam hal ini akan memperjelas eksistensi ilmu yang selalu membutuhkan ilmu pengetahuan yang lain.<sup>3</sup> Dalam hal ini, ilmu-ilmu agama tidak bisa berhenti pada pendekatan yang bersifat normatif, akan tetapi juga pendekatan yang bersifat empirik dengan memanfaatkan keilmuan umum sebagai pisau analisisnya (*tool of analysis*). Inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan yang bersifat interdisipliner dalam pengkajian ilmu keagamaan.

Akan tetapi sayangnya, pendekatan yang bersifat interdisipliner masih bersifat semu dalam realitas keilmuan Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI). Ilmu-ilmu umum sebagai ilmu bantu yang diajarkan di PTKI, semisal Sosiologi, Psikologi, Ilmu Hukum, Filsafat dan yang lain, masih terpisah (terdiferensiasi) dan belum bersentuhan secara langsung dengan *core* keilmuan Islam<sup>4</sup>. Sebagai akibatnya keilmuan Islam

---

\* Diambil dari buku *Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris dalam Kontelasi Tafsir Hukum Islam*, karya Abid Rohmanu yang diterbitkan oleh Ircisod, 2019.

<sup>1</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), XII.

<sup>2</sup> Jujun S. Suriasumantri, “Ilmuwan Berpaling Kepada Filsafat: Refleksi Seperempat Abad Filsafat Ilmu”, dalam Jujun S. Suriasumantri (Penyunting), *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), xiv.

<sup>3</sup> *Ibid.*, xvi.

<sup>4</sup> A. Qadri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), 44.

belum beranjak dari pendekatan yang bersifat normatif. Akibatnya, wacana keilmuan Islam dengan praksis di lapangan keserjanaan masih sering terjadi *gap*.

Bahkan, pada kenyataannya dialog keilmuan antar ilmu-ilmu keislaman (teologi/kalam, ilmu hukum/Fiqih, Akhlak-Tasawuf, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis dan yang lainnya) juga belum berkembang. Ilmu-ilmu ini seakan diajarkan secara terpisah. Pada Fakultas Syariah misalnya, tren penelitian Dosen dan mahasiwanya belum banyak memanfaatkan ilmu-ilmu agama di luar keilmuan syariah untuk memperkaya perspektif *core* keilmuan. Akibatnya, kajian kesyariahan cenderung bersifat normatif-legalistik.

Dalam konteks tulisan ini, relasi antar ilmu-ilmu keislaman (relasi internal) ini strategis untuk pengembangan paradigma ilmu hukum Islam. Relasi internal ini sama pentingnya dengan relasi eksternal, yakni relasi ilmu keagamaan (ilmu syariah) dengan ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu umum sebagai pendekatan penting untuk dilakukan karena kajian keagamaan tidak berhenti pada tataran yang normatif (memberikan justifikasi hukum misalnya), tetapi juga menjelaskan mengapa fenomena sosial-keagamaan terjadi. Sebagaimana Filsafat Ilmu merupakan payung pengembangan paradigma,<sup>5</sup> maka tugas mendialogkan antar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu keislaman dengan keilmuan umum adalah tugas filsafat.

## **1. Paradigma dan Pergeseran Paradigma: Paradigma Tunggal Versus Paradigma Jamak**

Paradigma adalah “cara memandang”. Ia ibarat kaca mata. Kacamata menentukan apa yang bisa dipandang dan bagaimana hasilnya. Kacamata kuda misalnya, hanya bisa memandang obyek yang di depan, dan tidak yang di kiri dan kanan. Kacamata minus misal yang lain, akan menghasilkan pandangan yang kabur bagi yang bermata netral. Intinya, paradigma adalah kacamata batin, kacamata persepsi yang menentukan apa yang kita yakini dan pada akhirnya menentukan perilaku.<sup>6</sup>

Thomas Kuhn, penggagas paradigma ilmu pengetahuan, memaknai paradigma sebagai “pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang mesti dipelajari, apa yang harus dipertanyakan dan bagaimana menjawabnya”. Definisi lain menyatakan bahwa paradigma adalah “seperangkat keyakinan dasar yang memuat pandangan mengenai manusia, Tuhan, realitas, alam, dan masyarakat yang tidak diuji dalam kegiatan dan proses keilmuan, melainkan diterima “jadi” dan mendahului kegiatan ilmiah”.<sup>7</sup>

Definisi pertama dari Kuhn sangat terkait dengan tarik-menarik antara disiplin Sosiologi dan Filsafat tentang objek bahasan masing-masing di saat Sosiologi

---

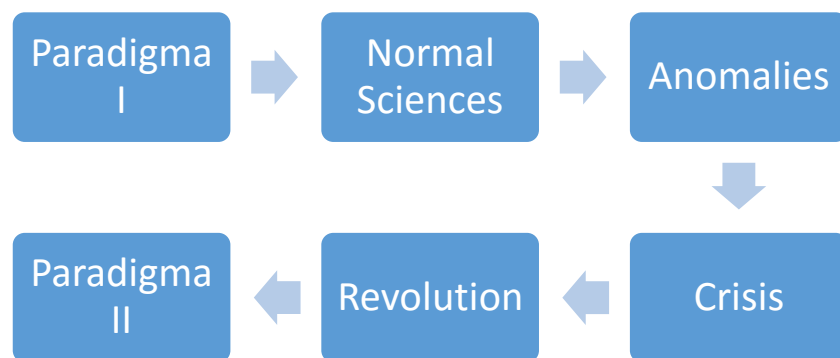
<sup>5</sup> Jujun S. Suriasumantri, “Ilmuwan Beraling Kepada Filsafat...”, xvii

<sup>6</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih* (Jakarta: Mizan, 2007), .37. Kacamata persepsi ini dalam ilmu-ilmu keagamaan lebih banyak ditentukan oleh persepsi teologis yang dibangun oleh kelompok keagamaan tertentu. Kelompok puritan misalnya, dalam mempersepsi agama lebih disandarkan pada teologi intoleran terhadap agama lain atau mazhab lain. Sebagai akibatnya, ilmu hukum misalnya, dikembangkan untuk melegitimasi kebencian terhadap kelompok yang dinilai sebagai musuh. Ini sebagaimana tindakan teror disemangati oleh doktrin jihad yang sejatinya kaya makna.

<sup>7</sup> Lihat, George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 1992) dan Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* (Tangerang: Pustaka Widyatama, 2006), 9.

tengah berjuang menjadi disiplin keilmuan yang bersifat mandiri, memisahkan dirinya dari keilmuan Filsafat. Sementara definisi kedua menurut penulis merupakan jabaran lebih lanjut dari konsep Kuhn dan lebih cocok dengan topik bahasan tulisan ini, yakni paradigma sebagai seperangkat keyakinan dasar dan prasuumsi yang dianut ilmuwan yang memberikan orientasi dan arah kajian atau penelitian.

Menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari apa yang ia sebut dengan *paradigm change* (perubahan paradigma) atau *paradigm shift* (pergeseran paradigma) yang bersifat revolutif. Menurutnya pada fase ilmu normal (*normal sciences*) para ilmuwan dibimbing oleh paradigma tunggal. Pada fase ini para ilmuwan mengembangkan dan menjabarkan paradigma yang dianut. Paradigma tunggal tersebut menjadi fondasi bagi semua kegiatan ilmiah mereka. Pada fase selanjutnya mereka mulai kritis dengan paradigma yang dianut karena mereka menemukan kejanggalan paradigmatik karena ketidaksesuaian teori mereka dengan tuntutan realitas. Fase ini lah yang disebut dengan fase “anomali” dan ketika anomali semakin tak terbendung, maka muncul fase “krisis”. Setelah fase krisis ini lah muncul paradigma baru sebagai awal perkembangan ilmu pengetahuan.



Karena itu revolusi ilmiah bermula dari kontestasi paradigma baru dengan paradigma lama yang dimenangkan oleh paradigma baru tentunya. Jika tidak, maka tidak akan terjadi revolusi ilmiah. Bisa juga sebagian ilmuwan mencoba untuk bertahan dengan paradigma lama karena perubahan paradigma berdampak berat pada studi dan kegiatan ilmiah mereka. Paradigma lama dan baru menurut Kuhn tidak ada benang merah rasionalitas, yakni tidak bisa disesuaikan dan diintegrasikan. Arti lainnya ilmuwan diharuskan untuk memilih paradigma baru atau bertahan dengan paradigma lama. Sungguh pun paradigma baru yang dipilih, ini tidak bermakna bahwa paradigma lama kurang ilmiah dibandingkan paradigma baru. tetapi lebih karena paradigma lama dinilai “tidak sesuai” lagi untuk memecahkan masalah.

Dalam ilmu sosial dan keagamaan, pada kenyataannya tidak ada *normal sciences* dan paradigma yang bersifat tunggal. Sebaliknya, dimungkinkan ada banyak paradigma (*multiple paradigm*).<sup>8</sup> Dalam ilmu sosiologi sebagaimana dinyatakan oleh George Ritzer misalnya, dikenal adanya ilmu sosial berparadigma ganda. Hampir tidak mungkin terjadi apa yang disebut dengan “*normal sciences*”.

<sup>8</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

Yang terjadi adalah variasi paradigma, masing-masing paradigma tetap mempunyai asumsi-asumsinya mereka sendiri, saling mempertanyakan asumsi yang dipegang kelompok lain. Pertentangan antara kelompok lebih bersifat politis, yakni saling berebut pengaruh paradigma masing-masing.<sup>9</sup> *Paradigm change* bagi Hans Kung tidak berarti *paradigm switch* (pertukaran atau pergantian paradigma). Ini artinya bahwa dalam satu komunitas keilmuan, bahkan dalam satu orang ilmuwan dimungkinkan adanya dua paradigma. Menurutnya, bisa terjadi kemungkinan dua paradigma yang saling berkompetisi dapat hidup secara “berdampingan”.

Mengapa terjadi variasi paradigma atau paradigma jamak dalam ilmu sosial? Mengapa pula terjadi perbedaan paradigma antarkomunitas atau bahkan sub-komunitas? Menurut Ritzer hal tersebut terjadi karena beberapa hal: *pertama*, sejak awal komunitas ilmuwan tertentu mengembangkan landasan filosofis yang berbeda dari yang lain tentang substansi ilmu. *Kedua*, karena landasan filosofis yang berbeda, maka kerangka teori yang dikembangkan juga berbeda. *Ketiga*, sebagai implikasi perbedaan teori, metode yang dikembangkan juga saling berbeda.<sup>10</sup>

Yang sering terjadi sesuai konteks di atas adalah “pertarungan” wacana paradigmatis antar penganutnya. Ini disebabkan kesetiaan fanatis penganut paradigma terhadap politik dan tujuan paradigmanya masing-masing.<sup>11</sup> Pada kenyataannya, tidak ada paradigma tunggal yang bisa menggambarkan realitas secara komprehensif. Meminjam istilah Jacques Derrida, selalu ada dimensi *thinkable* dan *unthinkable* karena yang terjadi adalah penggambaran realitas sesuai sudut pandang masing-masing paradigma. Berdasar kenyataan ini, dengan melepas fanatisme paradigmatis, pengembangan paradigma dan sistesis paradigma penting untuk dilakukan dalam rangka mengupayakan penggambaran realitas yang lebih baik dan utuh.

## 2. Unsur-Unsur Paradigma

Paradigma adalah *mode of thought* dan *mode of inquiry* yang kemudian menghasilkan *mode of knowing*. Kuhn menegaskan bahwa paradigma adalah konstelasi pendekatan, teori, dan prosedur yang dipergunakan oleh nilai dan tema pemikiran tertentu. Paradigma membentuk bagaimana cara seorang ilmuwan melihat sesuatu, apa yang dianggap sebagai masalah, masalah apa yang penting untuk dipecahkan, dan metode apa yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.<sup>12</sup> Paradigma dalam hal ini harus diletakkan dalam konteks sejarah. Sebagaimana sejarah bersifat dinamis, maka paradigma pengetahuan akan mengalami perubahan dan perkembangan.

Berdasar paparan di atas bisa dipahami bahwa ada unsur-unsur yang merangkai sebuah paradigma, ia tidak sekedar *worldview* (pandangan dunia), tetapi bagaimana *worldview* diterjemahkan pada pendekatan, teori dan metode ilmu pengetahuan. Heddy Shri Ahimsa-Putra menegaskan:

*“Paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran, yang digunakan*

---

<sup>9</sup> George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

<sup>10</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam...*, 74.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rahman, *Argumen Islam untuk Liberalisme* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 111.

*untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dann/atau masalah yang dihadapi”.*

Dalam definisi di atas, paradigma adalah sekumpulan konsep yang berelasi secara logis untuk memahami, menafsirkan, mendefinisikan dan menentukan realitas. Ia menjadi kerangka pemikiran. Adakalanya realitas yang dihadapi oleh manusia tidak bisa dipahami secara memuaskan dengan kerangka pemikiran tertentu. Dalam kondisi demikian, seseorang akan mencari alternatif kerangka pemikiran yang lain untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Menurut Ahimsa, setiap orang sesungguhnya mempunyai kerangka pemikiran tertentu, akan tetapi sering kali tidak disadari. Kecuali, mereka yang mampu melakukan refleksi terhadap pemikirannya sendiri, menyadari penggunaan metode dan prosedur dalam mencari pengetahuan.

Menurut Ahimsa, ada sembilan unsur yang membentuk paradigma dan kerangka pemikiran: 1) asumsi-asumsi dasar, 2) nilai-nilai, 3) masalah-masalah yang diteliti, 4) model, 5) konsep-konsep, 6) metode penelitian, 7) metode analisis, 8) hasil analisis atau teori, 9) representasi (etnografi). Berikut ini tabel penjelasan singkat unsur-unsur paradigma:<sup>13</sup>

No.	Unsur Paradigma	Deskripsi
1	Asumsi dasar	Pandangan mengenai suatu hal yang diterima kebenarannya. Asumsi dasar bisa lahir dari: perenungan filosofis-reflektif, dan penelitian empiris, pengamatan yang seksama. Asumsi dasar bersifat subjektif dan “ideologis”.
2	Nilai	Patokan untuk menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, salah atau benar, manfaat atau tidak. Penilaian ini bisa berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ilmu sosial budaya, penelitian ilmiah, analisis ilmiah dan hasil penellitian.
3	Model	Perumpamaan, analogi atau kiasan tentang gejala yang kan dipelajari. Model bersifat menyederhanakan gejala yang dipelajari, sebagai misalnya: kebudayaan ini seperti organisme.

<sup>13</sup> Disederhanakan dari Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*, Cet. III (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2017), 24 – 38.

4	Masalah yang diteliti	Setiap paradigma memiliki masalahnya sendiri. Masalah penelitian menyimpan asumsi dasar yang dipegangi oleh seorang peneliti.
5	Konsep pokok	Berbeda dengan asumsi dasar yang sering kali tidak eksplisit, konsep pokok dinyatakan secara tegas oleh peneliti. Definisi sebuah konsep bersifat relatif sesuai dengan sudut pandang yang dipakai.
6	Metode penelitian	Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode penelitian didasarkan pada jenis data apa yang digali, apakah data kuantitatif atau kualitatif. Jenis data ini juga terkait dengan paradigma yang dianut oleh seorang peneliti.
7	Metode analisis	Cara untuk memilah atau mengelompokkan data (kuantitatif/kualitatif) agar bisa dilakukan interpretasi dan ditetapkan relasi tertentu antar kategori data.
8	Hasil analisis/teori	Pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya mengenai hakikat sesuatu (gejala yang diteliti) dan/atau mengenai hubungan antar variabel/antar gejala yang diteliti.
9	Representasi	Penyajian/laporan penelitian yang memuat kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis.

Menurut penulis unsur-unsur kerangka pemikiran atau paradigma bisa diringkas menjadi: paradigma itu sendiri, pendekatan, teori, dan metode. Jika paradigma lebih dimaknai sebagai asumsi dasar dan nilai yang dipedomani peneliti, maka pendekatan adalah pisau analisis yang dipakai untuk membaca subject matter/kajian utama. Dari sisi pendekatan ini, dikenal ada pendekatan normatif, pendekatan empirik, dan pendekatan integratif terhadap studi Islam. Pendekatan normatif terbatas pada pengertian agama itu sendiri, yakni hanya melibatkan ilmu-ilmu agama, seperti Ilmu al-Qur'an, ilmu Hadis, Fikih, *Uşul al-Fiqh*, Tasawuf, Kalam/Teologi dan lainnya. Sementara pendekatan empirik adalah pendekatan

studi Islam yang melibatkan ilmu-ilmu non-agama sebagai pisau analisis, seperti sejarah, sosiologi, filsafat, antropologi dan lainnya. Sementara pendekatan integratif sudah mencoba untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empirik. Dilihat dari sisi varian keilmuan yang dipakai sebagai pendekatan ini lah kemudian dikenal juga dengan istilah studi Islam monodipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.

Setelah paradigma turun pada pendekatan, selanjutnya pendekatan harus diturunkan pada teori. Teori yang dipilih dalam hal ini harus sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Teori dalam hal ini adalah *the way to think* atau cara bagaimana menalar. Lebih luas, teori biasa didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis berfungsi sebagai cara untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menafsirkan, atau meramalkan fenomena yang dimamati oleh ilmuwan. Dalam konteks studi Islam misalnya, bila seorang ilmuwan memutuskan untuk memakai pendekatan empirik dengan Sosiologi sebagai ilmu bantu analisis, ia bisa memilih *grand theory* fungsionalisme struktural, konflik, dan seterusnya. Jika seseorang memilih pendekatan normatif misalnya dengan *Uṣūl al-Fiqh* sebagai alat analisis terhadap objek studi, maka ia bisa memilih teori *istiḥsān*, *qiyās*, *‘amal ahl al-madīnah*, dan seterusnya.

Yang perlu ditekankan di sini, teori tidak bersifat permanen. Ia akan cenderung berubah sesuai dengan visi paradigmatis yang diemban. Ini berlaku tidak saja pada teori-teori sosial yang dipakai dalam studi Islam, akan tetapi juga teori-teori fikih dan ushul al-fiqh yang umumnya dinilai bersifat normatif. Kuntowijoyo menegaskan bahwa:

*“Dalam kondisi masyarakat industrail seperti sekarang ini, kita membutuhkan teori sosial yang berbeda dengan yang mungkin pernah dirumuskan pada masa lalu seperti yang misalnya terdapat dalam asumsi-asumsi teoritis kitab-kitab fiqh (dan ushul al-fiqh). Hal ini karena asumsi-asumsi tersebut hanya valid untuk menjelaskan dinamika masyarakat agraris yang tidak relevan lagi dipakai untuk kondisi masyarakat industrial sekarang ini”*.<sup>14</sup>

Selanjutnya, teori di-*break down* ke dalam metode. Metode adalah cara kerja yang bersistem, yakni bagaimana menerapkan teori pada kegiatan penelitian, atau bagaimana penelitian akan dilakukan secara praktis. Karena itu metode harus sesuai dengan pendekatan dan teori yang pilih. Jika seseorang memilih pendekatan empirik misalnya dengan teori fungsionalisme struktural, maka secara umum dia harus merumuskan metode penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi), atau dia harus merumuskan metode kualitatif atau kuantitatif.

Penjelasan-penjelasan di atas tidak bermaksud untuk berpanjang lebar persoalan metodologis dan teknis penelitian/studi, akan tetapi sekedar menunjukkan bagaimana keterikatan paradigma dengan pendekatan, teori dan metode. Dalam konteks penelitian ini, ketika berbicara paradigma teo-antroposentris, kajian tidak berhenti pada wacana abstrak yang bersifat teologis dan paradigmatis saja, akan tetapi juga masuk pada wilayah-wilayah yang bersifat

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017), 578.

epistemologis, yakni wilayah pendekatan dan teori yang terkait dengan bagaimana pengetahuan diperoleh.

Pada abad pertengahan Eropa (berlangsung sejak abad ke-10 sampai abad ke-15) memandang segala yang ada dari sudut Tuhan. Apapun dipertanyakan dari sudut Tuhan sebagai Yang Mempunyai kekuasaan penuh terhadap alam. Inilah yang disebut dengan paham dan paradigma teosentrisme (*theos*: Tuhan, *centrum*: pusat). Pada masa ini Eropa berada dalam era kegelapan ditandai dengan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan karena dominasi Gereja terhadapnya. Empat ratus tahun kemudian terjadi pergeseran paradigma, titik acuan segala sesuatu bukan lagi Tuhan, akan tetapi manusia. Apapun dipertanyakan dari sudut manusia, bahkan wacana tentang Tuhan sekalipun. Ini lah yang disebut dengan paradigma antroposentrisme (*anthropos*: manusia, *centrum*: pusat).<sup>15</sup>

Sementara dalam sejarah keislaman, era kegelapan peradaban Barat justru menjadi era kejayaan peradaban Islam. kejayaan peradaban Islam khususnya terjadi pada era Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Pada era ini terjadi aktivitas keilmuan yang luar biasa, di antaranya penerjemahan secara masif naskah-naskah Yunani tentang filsafat dan ilmu. selanjutnya, muncul ilmuan-ilmuan besar seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Bajjah, Ibn Thufail, Ibn Rusyd, dan yang lainnya.<sup>16</sup> Pada era ini lah umat Islam menganut paradigma teoantroposentris dengan kecenderungan pada kemampuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dan mensinergikan akal dan wahyu. Hanya kemudian, pada abad 18 era kejayaan tersebut harus berakhir dengan adanya pergeseran paradigma keilmuan ke arah teosentris dengan merebaknya berbagai gerakan tasawuf dan tarekat yang cenderung menjauhi dunia. Pada saat yang sama kemunduran peradaban keilmuan ini juga ditandai dengan semakin ditinggalkannya penggunaan rasio. Karya al-Ghazali, *Tahafut al-Falāsifah*, dinilai sebagai pertanda awal ditundukkannya rasio oleh kuasa agama yang normatif.

Berbeda dengan sejarah Barat dan Eropa, tentang pertarungan otoritas Gereja dan ilmu pengetahuan, Islam sejak awal kemunculannya telah menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan mencoba untuk mendudukan posisi wahyu dan akal secara berimbang. Hanya karena faktor politik, kesetimbangan antara wahyu dan akal (agama dan ilmu pengetahuan) mengalami dinamika fluktuatif. Karena itu, sementara dalam tradisi Barat dikenal paradigma antroposentris (manusia sebagai pusat) sebagai bentuk perlawanan terhadap agama dan otoritas gereja, dalam tradisi Islam sesungguhnya hanya dikenal dengan paradigma teoantroposentris. Pada saat peradaban keilmuan Islam mengalami kemunduran dengan dominasi paradigma teosentris, paradigma teoantroposentris dicoba untuk digali dan dihidupkan kembali dengan bentuknya yang baru menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan baru. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) tidak sebagaimana di Barat, yakni dari teosentris ke antroposentris, tetapi dari teosentris ke teoantroposentris.

---

<sup>15</sup> Franz Magnis Suseno, *Menalar Tuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 46.

<sup>16</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 48.